



## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 47 TAHUN 2023

## TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai Landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
3. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
9. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
17. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
18. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
19. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
20. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
21. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

25. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
29. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.106.998.079.270,00 (*Tiga Triliun Seratus Enam Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapa Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah Rp1.066.531.465.270,00;
- b. Pendapatan transfer Rp2.040.116.614.000,00;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 350.000.000,00.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.066.531.465.270,00 (*Satu Triliun Enam Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah Rp816.201.042.959,00;
  - b. Retribusi daerah Rp20.200.000.000,00;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan Rp10.114.672.311,00;
  - d. Lain-lain PAD yang sah Rp220.015.750.000,00;
- (2) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang direncanakan sebesar Rp2.040.116.614.000,00 (*Dua Triliun Empat Puluh Miliar Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan sebesar Rp2.040.116.614.000,00 (*Dua Triliun Empat Puluh Miliar Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan Rp2.027.468.120.000,00;
  - b. Insentif Fiskal Rp12.648.494.000,00;

- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pendapatan hibah yang direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp816.201.042.959,00 (*Delapan Ratus Enam Belas Milyar Dua Ratus Satu Juta Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp95.000.000.000,00;
  - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp100.000.000.000,00.
  - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp550.000.000.000,00;
  - Pajak Air Permukaan Rp4.000.000.000,00;
  - Pajak Rokok Rp65.201.042.959,00;
  - Pajak Alat Berat Rp2.000.000.000,00.
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.200.000.000,00 (*Dua Puluh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- Retribusi Jasa Usaha Rp20.000.000.000,00;
  - Retribusi Perizinan Tertentu Rp200.000.000,00.
- (3) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD yang direncanakan sebesar Rp10.114.672.311,00 (*Sepuluh Miliar Seratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah*).
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp220.015.750.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Miliar lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- Jasa Giro sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*);
  - Pendapatan Bunga sebesar Rp16.000.000.000,00 (*Enam Belas Milyar Rupiah*);
  - Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*);
  - Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp15.750.000,00 (*Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
  - Pendapatan BLUD sebesar Rp200.000.000.000,00 (*Dua Ratus Miliar Rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.000.000.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Miliar Rupiah*), yang terdiri atas :
- PKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp572.755.000,00;
  - PKB-Mobil Penumpang-Jeep Rp4.841.400.000,00;
  - PKB-Mobil Penumpang-Minibus Rp34.425.350.000,00;
  - PKB-Mobil Bus-Microbus Rp330.800.000,00;
  - PKB-Mobil Bus-Bus Rp12.010.000;
  - PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp15.309.050.000,00;
  - PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck Rp6.239.000.000;
  - PKB-Mobil Barang/Beban-Truck Rp4.726.200.000,00;
  - PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van Rp38.235.000,00;
  - PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp26.921.000.000;

- k. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp1.584.200.000,00.
- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (*Seratus Miliar Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp576.600.000,00;
  - b. BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep Rp5.900.000.000,00;
  - c. BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus Rp24.920.000.000,00;
  - d. BBNKB-Mobil Bus-Microbus Rp4.310.000.000,00;
  - e. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp17.700.400.000,00;
  - f. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck Rp2.368.000.000,00;
  - g. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck Rp2.260.000.000,00;
  - h. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van Rp15.000.000,00;
  - i. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp41.918.000.000,00;
  - j. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp32.000.000,00
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp550.000.000.000,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. PBBKB-Bahan Bakar Bensin Rp82.000.000.000,00;
  - b. PBBKB-Bahan Bakar Solar Rp468.000.000.000,00.
- (4) Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat Milyar Rupiah*).
- (5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp65.201.042.959,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Dua Ratus Satu Juta Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).
- (6) Anggaran Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*).
- (7) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Miliar Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp10.000.000.000,00;
  - b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Rp10.000.000.000,00.
  - c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp0 (Nihil).
- (8) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Rp100.000.000,00;
  - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan Rp100.000.000,00.
- (9) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) adalah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) yang direncanakan sebesar Rp10.114.672.311,00 (*Sepuluh Miliar Seratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah*).
- (10) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf a adalah Jasa Giro pada Kas Daerah yang direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*).
- (11) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf b adalah Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah yang direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (*Enam Belas Miliar Rupiah*).

- (12) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*), yang terdiri atas :
- Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp1.886.046.010,00;
  - Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp54.675.000,00;
  - Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp50.000.000,00;
  - Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan Rp9.278.990,00.
- (13) Anggaran Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf d direncanakan sebesar Rp15.750.000,00 (*Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar 0,00 (*Nihil*).
  - Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu Rp15.750.000,00.
- (14) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf e adalah pendapatan BLUD dari jasa layanan yang direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00 (*Dua Ratus Miliar Rupiah*).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp2.027.468.120.000,00 (*Dua Triliun Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp624.155.754.000,00;
  - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.154.831.485.000,00;
  - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp132.379.441.000,00;
  - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp116.101.440.000,00.
- (2) Anggaran Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp12.648.494.000,00 (*Dua Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a adalah Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri yang direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

#### Pasal 8

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp3.502.591.835.909,00 (*Tiga Triliun Lima Ratus Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:

- Belanja Operasi Rp2.254.725.220.218,00;
- Belanja Modal Rp578.239.586.981,00;
- Belanja Tidak Terduga Rp15.000.000.000,00;
- Belanja Transfer Rp654.627.028.710.

## Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp2.254.725.220.218,00 (*Dua Triliun Dua Ratus Lima Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai Rp906.949.239.789,00;
  - b. Belanja Barang dan Jasa Rp1.133.264.064.249,00;
  - c. Belanja Subsidi Rp19.152.791.500,00;
  - d. Belanja Hibah Rp191.370.124.680,00; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial Rp3.989.000.000,00.
- (2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp578.239.586.981,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah Rp10.741.000.000,00;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp99.342.329.089;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp203.128.626.892;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp257.480.576.000;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp63.500.000,00;
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp7.483.555.000,00.
- (3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (*Lima Belas Miliar*).
- (4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp654.627.028.710,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil Rp411.168.078.710,00;
  - b. Belanja bantuan keuangan Rp243.458.950.000,00.

## Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp906.949.239.789,00 (*Sembilan Ratus Enam Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp376.830.070.463,00;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp390.273.803.097,00;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp88.219.567.951,00;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp24.601.656.218,00;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp301.879.704,00;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp1.722.262.356,00;
  - g. Belanja Pegawai BLUD Rp25.000.000.000,00.
- (2) Anggaran belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.133.264.064.249,00 (*Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Rp235.027.342.172,00;
  - b. Belanja Jasa Rp366.345.622.565,00;
  - c. Belanja Pemeliharaan Rp35.426.829.728,00;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas Rp269.562.519.789,00;



- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat Rp28.322.990.000,00;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp65.778.760.000,00;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp132.800.000.000,00.
- (3) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c adalah Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta yang direncanakan sebesar Rp19.152.791.500,00 (*Sembilan Belas Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (4) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp191.370.124.680,00 (*Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Rp1.734,408.000,00;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp180.103.096.680,00;
  - c. Belanja Hibah Dana BOS Rp7.032.620.000,00;
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp2.500.000.000,00.
- (5) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.989.000.000,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp664.000.000,00;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp3.325.000.000,00;
- (6) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp10.741.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah*);
- (7) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp99.342.329.089,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar Rp228.050.000,00;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp26.391.033.965,00;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp409.350.000,00;
  - d. Belanja Modal Alat pertanian Rp35.950.000,00;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp17.795.554.765,00;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp1.883.164.500,00;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp32.553.815.541,00;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp10.458.581.000,00;
  - i. Belanja Modal Komputer Rp5.388.691.181,00;
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp49.950.000,00;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp1.386.750.000,00;
  - l. Belanja Modal Rambu-Rambu Rp800.000.000,00.
- (8) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp203.128.626.892,00 (*Dua Ratus Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal bangunan gedung Rp200.936.646.892,00;
  - b. Belanja Modal Bangunan Menara Rp891.980.000,00;
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp1.300.000.000,00.

- (9) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp257.480.576.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp232.552.591.000,00;
  - Belanja Modal Bangunan Air Rp13.653.000.000,00;
  - Belanja Modal Instalasi Rp11.240.000.000,00;
  - Belanja Modal jaringan Rp34.985.000,00.
- (10) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp63.500.000,00 (*Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp40.000.000,00;
  - Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp23.500.000.
- (11) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp7.483.555.000,00 (*Tujuh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang terdiri atas :
- Belanja Modal Aset lainnya-Aset Tidak Berwujud Rp483.555.000,00;
  - Belanja Modal Aset Lainnya-BLUD Rp7.000.000.000,00.
- (12) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (*Lima Belas Miliar Rupiah*).
- (13) Anggaran Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) huruf a adalah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa yang direncanakan sebesar Rp411.168.078.710,00 (*Empat Ratus Sebelas Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah*).
- (14) Anggaran Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) huruf b adalah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota yang direncanakan sebesar Rp243.458.950.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp376.830.070.463,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
- Gaji Pokok ASN Rp257.047.335.232,00;
  - Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp23.620.651.538,00;
  - Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp9.594.662.186,00;
  - Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp17.308.890.684;
  - Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp4.951.723.412;
  - Belanja Tunjangan Beras ASN Rp16.764.860.043,00;
  - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp17.903.315.355;
  - Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp6.162.925;
  - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp26.974.961.115;
  - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp600.386.072;
  - Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp1.767.925.885;
  - Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp289.196.016.

- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN yang direncanakan sebesar Rp390.273.803.097,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.219.567.951,00 (*Delapan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp16.338.977.451,00;
  - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp47.408.947.000,00;
  - c. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Rp547.382.000,00;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp1.258.500.000,00;
  - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Rp38.000.000,00;
  - f. Belanja Honorarium Rp21.678.471.500;
  - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp949.290.000,00.
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.601.656.218,00 (*Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.120.000.000,00;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp126.000.000,00;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp96.000.000,00;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp105.336.000;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.644.000.000,00;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp215.625.150;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp36.000.000;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp6.300.000.000,00;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp1.775.812.500,00;
  - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp50.187.378,00;
  - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD Rp10.184,00;
  - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp7.370.665.006,00;
  - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp5.376.000.000,00;
  - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp386.000.000,00.
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp301.879.704,00 (*Tiga Ratus Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp78.000.000,00;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp9.128.000,00;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp142.688.000,00;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp4.823.776,00;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp6.072.792,00;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp2.848,00;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp9.520.000,00;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp684.288,00;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi KDH/WKDH Rp960.000,00;

- j. Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Pajak Daerah Rp50.000.000,00
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.722.262.356,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp288.000.000,00;
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp1.434.262.356,00.
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Rupiah*).
- (8) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp235.027.342.172,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang Pakai Habis Rp232.826.736.168,00;
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp1.389.856.224,00.
- (9) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp366.345.622.565,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor Rp235.298.320.422,00;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp35.130.428.200,00;
  - c. Belanja Sewa tanah Rp28.500.000,00;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp8.782.657.057,00;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp13.791.061.536;
  - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan irigasi Rp9.100.000,00;
  - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp6.000.000,00;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp34.398.977.750,00;
  - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp21.201.875.000,00;
  - j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Rp30.525.000,00;
  - k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp111.000.000,00;
  - l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp17.525.987.600,00;
  - m. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud Rp31.190.000,00;
- (10) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp35.426.829.728,00 (*Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp15.750.000,00;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp22.216,266.700,00;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp9.005.506.028,00;
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp3.777.422.000,00;
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp62.885.000,00;
  - f. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Rp349.000.000,00;
- (11) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp269.562.519.784,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp263.062.519.784,00;
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp6.500.000.000,00.

- (12) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp28.322.990.000,00 (*Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp19.722.990.000,00;
  - Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp8.600.000.000,00.
- (13) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp65.778.760.000,00 (*Enam Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (14) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp132.800.000.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*).
- (15) Anggaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp19.152.791.500,00 (*Sembilan Belas Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (16) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp1.734.408.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Ribu Rupiah*).
- (17) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp180.103.096.680,00 (*Seratus Delapan Puluh Miliar Seratus Tiga Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp157.845.891.680,00;
  - Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp21.525.350.000,00;
  - Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp22.255.000,00;
  - Belanja Hibah Kepada Koperasi Rp154.600.000,00;
  - Belanja Hibah Kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Rp150.000.000,00;
  - Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp405.000.000,00.
- (18) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp7.032.620.000,00 (*Tujuh Miliar Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta Rp5.000.350.000,00;
  - Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima Oleh Satdikmen Swasta Rp1.781.470.000,00;
  - Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima Oleh Satdiksus Swasta Rp250.800.000,00
- (19) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

- (20) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp664.000.000,00 (*Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang Yang di Rencanakan Kepada Individu Rp240.000.000,00;
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang di Rencanakan Kepada Individu Rp424.000.000,00;
- (21) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp3.325.000.000,00 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp625.000.000,00;
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp2.700.000.000,00.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (6) adalah Belanja Modal Tanah Persil yang direncanakan sebesar Rp10.741.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah*).
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (7) huruf a adalah Belanja Modal Alat Bantu yang direncanakan sebesar Rp228.050.000,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp26.391.033.965,00 (*Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp21.628.696.500,00;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Rp4.762.337.465,00.
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (7) huruf c direncanakan sebesar Rp409.350.000,00 (*Empat Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Rp18.750.000,00;
  - b. Belanja Modal Alat Ukur Rp390.600.000.
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (7) huruf d adalah Belanja Modal Alat Pengolahan yang direncanakan sebesar Rp35.950.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (7) huruf e direncanakan sebesar Rp17.795.554.765,00 (*Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Kantor Rp5.156.162.505,00;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp12.147.592.260,00;
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp491.800.000,00.

- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (7) huruf f direncanakan sebesar Rp1.883.164.500,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Studio Rp1.550.644.500,00;
  - Belanja Modal Alat Komunikasi Rp182.010.000,00;
  - Belanja Modal Peralatan Pemancar Rp134.800.000,00;
  - Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Rp15.710.000,00.
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (7) huruf g adalah Belanja Modal Alat Kedokteran yang direncanakan sebesar Rp32.553.815.541,00 (*Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (7) huruf h direncanakan sebesar Rp10.458.581.000,00 (*Sepuluh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp1.009.520.000,00;
  - Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp6.760.186.000,00;
  - Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Rp38.875.000,00;
  - Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Rp1.585.000.000,00;
  - Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodynamica Rp1.065.000.000,00.
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (7) huruf i direncanakan sebesar Rp7.350.129.318,00 (*Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Komputer Unit Rp5.388.691.181,00;
  - Belanja Modal Peralatan Komputer Rp1.961.438.137,00.
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (7) huruf j adalah Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi yang direncanakan sebesar Rp49.950.000,00.
- (12) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (7) huruf k direncanakan sebesar Rp1.386.750.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri atas :
- Belanja Modal Alat Deteksi Rp15.000.000,00;
  - Belanja Modal Alat Pelindung Rp1.362.750.000,00;
  - Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Rp9.000.000,00.
- (13) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (7) huruf l adalah Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat yang direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*).
- (14) Anggaran Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp200.936.646.892,00 (*Dua Ratus Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp175.491.926.892,00;
  - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp25.444.720.000.

- (15) Anggaran Belanja Modal Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf b adalah Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan yang direncanakan sebesar Rp891.980.000,00 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (16) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) huruf c adalah Belanja Modal Tugu/Tanda Batas yang direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- (17) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp232.552.591.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan Rp207.872.591.000,00;
  - b. Belanja Modal Jembatan Rp24.680.000.000,00.
- (18) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) huruf b adalah Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam yang direncanakan sebesar Rp13.653.000.000,00 (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*).
- (19) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (9) huruf c direncanakan sebesar Rp11.240.000.000,00 (*Sebelas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Rp9.720.000.000,00;
  - b. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Rp1.400.000.000,00;
  - c. Belanja Modal Instalasi Pengaman Rp120.000.000,00;
  - d. Belanja Modal Instalasi Lain 0,00 (*Nihil*).
- (20) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (9) huruf d adalah Belanja Modal jaringan Listrik yang direncanakan sebesar Rp34.985.000,00 (*Tiga Puluh Empat Juta Sembilan ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (21) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) huruf a adalah Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro yang direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta Rupiah*).
- (22) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (10) huruf b adalah Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian yang direncanakan sebesar Rp23.500.000,00 (*Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (23) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (11) huruf a adalah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud yang direncanakan sebesar Rp483.555.000,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (24) Anggaran Belanja Modal Aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (*Tujuh Miliar Rupiah*).
- (25) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (12) direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (*Lima Belas Miliar Rupiah*).
- (26) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (13) direncanakan sebesar Rp411.168.078.710,00 (*Empat Ratus Sebelas Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:



- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten Rp308.787.471.320,00;
  - b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota Rp102.380.607.390,00.
- (27) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (14) direncanakan sebesar Rp243.458.950.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- c. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Rp145.500.000.000,00;
  - d. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Rp97.958.950.000,00.

### Pasal 13

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp395.593.756.693,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh lima Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp415.593.756.639,00 (*Empat Ratus Lima Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp415.593.756.639,00 (*Empat Ratus Lima Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja yang direncanakan sebesar Rp415.593.756.639,00 (*Empat Ratus Lima Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).

### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b adalah Penyertaan Modal Daerah yang direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Miliar Rupiah*).
- (2) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Miliar Rupiah*).
- (3) Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD yang direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua Puluh Miliar Rupiah*).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp395.593.756.639,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp395.593.756.639,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) direncanakan sebesar 0,00 (*nihil*).

#### Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1.	Lampiran I	:	Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II	:	Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3.	Lampiran III	:	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4.	Lampiran IV	:	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5.	Lampiran V	:	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6.	Lampiran VI	:	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

#### Pasal 17

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 18

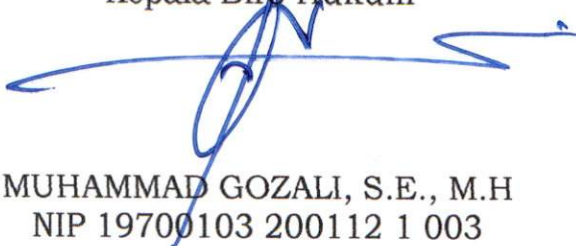
Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum

  
MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H  
NIP 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 Desember 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 47



**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.066.531.465.270,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	816.201.042.959,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	95.000.000.000,00
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	572.755.000,00
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	534.455.000,00
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	38.300.000,00
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	4.841.400.000,00
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	4.701.000.000,00
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	140.400.000,00
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	34.425.350.000,00
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	33.131.500.000,00
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	80.740.000,00
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	1.213.110.000,00
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	330.800.000,00
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	223.500.000,00
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	19.500.000,00
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	87.800.000,00
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	12.010.000,00
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	4.970.000,00
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	7.040.000,00
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	15.309.050.000,00
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	14.364.550.000,00
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	24.500.000,00
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	920.000.000,00
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	6.239.000.000,00
4.1.01.01.07.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	5.847.000.000,00
4.1.01.01.07.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	215.000.000,00
4.1.01.01.07.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	177.000.000,00
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	4.726.200.000,00
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	4.340.000.000,00
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	270.000.000,00
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	116.200.000,00
4.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	38.235.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.01.09.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	37.000.000,00
4.1.01.01.09.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	1.235.000,00
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	26.921.000.000,00
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	26.714.000.000,00
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	207.000.000,00
4.1.01.01.11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	1.584.200.000,00
4.1.01.01.11.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	1.511.200.000,00
4.1.01.01.11.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	73.000.000,00
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	100.000.000.000,00
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	576.600.000,00
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	576.600.000,00
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	5.900.000.000,00
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	5.900.000.000,00
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	24.920.000.000,00
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	24.920.000.000,00
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	4.310.000.000,00
4.1.01.02.04.0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	4.310.000.000,00
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	17.700.400.000,00
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	17.700.400.000,00
4.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	2.368.000.000,00
4.1.01.02.07.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	2.368.000.000,00
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	2.260.000.000,00
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	2.260.000.000,00
4.1.01.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	15.000.000,00
4.1.01.02.09.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	15.000.000,00
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	41.918.000.000,00
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	41.918.000.000,00
4.1.01.02.11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	32.000.000,00
4.1.01.02.11.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	32.000.000,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	550.000.000.000,00
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	82.000.000.000,00
4.1.01.03.01.0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin	82.000.000.000,00
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	468.000.000.000,00
4.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar	468.000.000.000,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	4.000.000.000,00
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	4.000.000.000,00
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	4.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.05	Pajak Rokok	65.201.042.959,00
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	65.201.042.959,00
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	65.201.042.959,00
4.1.01.17	Pajak Alat Berat	2.000.000.000,00
4.1.01.17.01	Pajak Alat Berat	2.000.000.000,00
4.1.01.17.01.0001	Pajak Alat Berat	2.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	20.200.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	20.000.000.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	10.000.000.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	10.000.000.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	10.000.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	200.000.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	100.000.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	100.000.000,00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	100.000.000,00
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	100.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.114.672.311,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.114.672.311,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.114.672.311,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.114.672.311,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	220.015.750.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.000.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	16.000.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	16.000.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	16.000.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.000.000.000,00
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.886.046.010,00
4.1.04.12.01.0015	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	11.788.000,00
4.1.04.12.01.0019	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	97.141.000,00
4.1.04.12.01.0023	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	652.749.000,00
4.1.04.12.01.0027	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	10.236.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.12.01.0031	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	3.300.000,00
4.1.04.12.01.0035	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	307.900.000,00
4.1.04.12.01.0039	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	121.700.000,00
4.1.04.12.01.0043	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	71.387.000,00
4.1.04.12.01.0047	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	50.000.000,00
4.1.04.12.01.0051	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	509.416.010,00
4.1.04.12.01.0055	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	50.429.000,00
4.1.04.12.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	54.675.000,00
4.1.04.12.02.0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	950.000,00
4.1.04.12.02.0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	3.528.600,00
4.1.04.12.02.0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	5.751.200,00
4.1.04.12.02.0004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	130.000,00
4.1.04.12.02.0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	26.100.000,00
4.1.04.12.02.0007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	4.810.000,00
4.1.04.12.02.0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	3.105.200,00
4.1.04.12.02.0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	10.300.000,00
4.1.04.12.03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	50.000.000,00
4.1.04.12.03.0001	Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Bensin	25.000.000,00
4.1.04.12.03.0002	Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Solar	25.000.000,00
4.1.04.12.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	9.278.990,00
4.1.04.12.04.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	9.278.990,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	15.750.000,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00
4.1.04.13.02.0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	15.750.000,00
4.1.04.13.03.0009	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	15.750.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	200.000.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	200.000.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	200.000.000.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.040.116.614.000,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.040.116.614.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.027.468.120.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	624.155.754.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	42.144.813.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	22.817.054.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	385.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	3.280.728.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	473.117.518.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	17.621.996.000,00
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	65.173.260.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.154.831.485.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.154.831.485.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	132.379.441.000,00
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	29.314.673.000,00
4.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	5.067.526.000,00
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	24.102.981.000,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	473.788.000,00
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	6.387.244.000,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	8.613.655.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	47.515.219.000,00
4.2.01.01.03.0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	10.904.355.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	116.101.440.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	57.765.680.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.852.500.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	47.408.947.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.258.500.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	547.382.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.256.774.000,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.590.226.000,00
4.2.01.01.04.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	520.000.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	901.431.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	12.648.494.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	12.648.494.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	12.648.494.000,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>350.000.000,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	350.000.000,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	350.000.000,00
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	350.000.000,00
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	350.000.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.106.998.079.270,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.254.725.220.218,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	906.949.239.789,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	376.830.070.463,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	257.047.335.232,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	230.276.927.466,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	26.770.407.766,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	23.620.651.538,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	21.792.486.144,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.828.165.394,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.594.662.186,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.592.662.186,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	2.000.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.308.890.684,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.837.861.463,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.471.029.221,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.951.723.412,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.928.860.187,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	22.863.225,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	16.764.860.043,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	15.196.081.854,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.568.778.189,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	17.903.315.355,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	17.662.062.098,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	241.253.257,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.162.925,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.695.064,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	467.861,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	26.974.961.115,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	25.153.683.530,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.821.277.585,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	600.386.072,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	600.036.072,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	350.000,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.767.925.885,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.766.925.885,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.000.000,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	289.196.016,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	289.196.016,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	390.273.803.097,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	390.273.803.097,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	348.833.074.529,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	41.440.728.568,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	88.219.567.951,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	16.338.977.451,00
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	2.000.000.000,00
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.000.000.000,00
5.1.01.03.01.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.000.000.000,00
5.1.01.03.01.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	100.000.000,00
5.1.01.03.01.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	1.238.977.451,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	47.408.947.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	47.408.947.000,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	547.382.000,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	547.382.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.258.500.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.258.500.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	38.000.000,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	38.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	21.678.471.500,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	16.114.890.800,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.554.570.700,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	9.010.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	949.290.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	949.290.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.601.656.218,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.120.000.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.120.000.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	126.000.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	126.000.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	96.000.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	96.000.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	105.336.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	105.336.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.644.000.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.644.000.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	215.625.150,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	215.625.150,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	36.000.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	36.000.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.300.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.300.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.775.812.500,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.775.812.500,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	50.187.378,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	50.187.378,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	30.184,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	30.184,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.370.665.006,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	125.665.006,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	23.000.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.000.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	7.212.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.376.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.376.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	386.000.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	386.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	301.879.704,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.000.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.000.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.128.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.128.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	142.688.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	142.688.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.823.776,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.823.776,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.072.792,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	6.072.792,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.848,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.848,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.520.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	9.520.000,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	684.288,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	684.288,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	960.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	960.000,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	50.000.000,00
5.1.01.05.10.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Alat Berat	50.000.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.722.262.356,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	288.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	288.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.434.262.356,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.434.262.356,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	25.000.000.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	25.000.000.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	25.000.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.133.264.064.249,00
5.1.02.01	Belanja Barang	235.027.342.172,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	232.826.736.168,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	22.270.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	148.233.700,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.978.025.643,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	45.000.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.658.470.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	68.747.570,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	58.795.200,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	195.693.540,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.444.978.300,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.341.756.451,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	211.000.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	514.250.000,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	247.500.000,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	4.800.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	85.730.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	43.250.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.882.022.034,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.700.876.211,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.249.633.495,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	895.678.613,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	200.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.084.550.975,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.578.365.290,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	918.904.524,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	203.552.750,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	82.120.100,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	4.869.168.740,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.499.883.470,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	562.168.082,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.345.471.095,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.142.206.000,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	87.355.218.500,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	862.500.000,00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	4.329.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.203.648.500,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	300.481.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1.668.000.000,00
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	31.516.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.482.602.640,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.321.602.625,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	13.000.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	33.900.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	3.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.942.008.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	305.650.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	369.702.500,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	138.600.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	857.280.500,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.835.519.300,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	115.500.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	383.130.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	12.000.000,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	24.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	448.100.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.257.349.220,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.574.996.600,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.389.856.224,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	4.375.000,00
5.1.02.01.02.0005	Belanja Komponen-Attachment	1.385.481.224,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	810.749.780,00
5.1.02.01.04.0035	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	695.000.000,00
5.1.02.01.04.0102	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	2.775.000,00
5.1.02.01.04.0104	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.900.000,00
5.1.02.01.04.0118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	34.650.000,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.807.280,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.500.000,00
5.1.02.01.04.0127	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	19.500.000,00
5.1.02.01.04.0137	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	1.200.000,00
5.1.02.01.04.0404	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	13.200.000,00
5.1.02.01.04.0411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	9.217.500,00
5.1.02.01.04.0451	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	3.000.000,00
5.1.02.01.04.0710	Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	5.000.000,00
5.1.02.01.04.0766	Belanja Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman-Tanaman	20.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	366.345.622.565,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	235.298.320.422,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.540.435.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.577.650.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	59.400.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	852.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	180.900.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	284.250.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	143.150.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	670.050.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	847.200.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.410.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.564.150.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	244.344.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.097.697.584,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	737.945.664,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	100.500.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	249.750.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	320.000.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	467.250.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	493.150.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.391.100.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	67.075.156.250,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.253.362.056,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	20.287.162.864,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.443.612.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.385.426.472,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.096.580.244,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	199.326.244,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.094.934.360,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	127.701.416,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	664.385.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	44.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	283.184.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	483.450.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.883.665.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	8.006.750.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	215.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	108.985.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	210.728.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	100.200.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	21.600.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	25.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	18.173.760.000,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	1.996.800.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	316.160.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.195.963.750,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	21.258.713.918,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	285.680.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.497.685.600,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.138.776.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	19.050.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.202.600.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	932.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	35.130.428.200,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	19.634.000.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.449.895.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	874.610.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	93.100.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	85.800.000,00
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	15.500.000,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	6.534.240.000,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	4.443.283.200,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	28.500.000,00
5.1.02.02.03.0009	Belanja Sewa Tanah Kering	28.000.000,00
5.1.02.02.03.0018	Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir	500.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.782.657.057,00
5.1.02.02.04.0014	Belanja Sewa Floating Excavator	2.160.000.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	150.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	173.860.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.102.100.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	38.000.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	22.500.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	457.600.000,00
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	72.000.000,00
5.1.02.02.04.0058	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	2.684.181.834,00
5.1.02.02.04.0112	Belanja Sewa Alat Pengolahan Lainnya	6.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	62.830.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	47.837.436,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	516.542.787,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	400.265.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	455.550.000,00
5.1.02.02.04.0139	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio SSB	7.800.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	64.000.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	79.790.000,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	276.800.000,00
5.1.02.02.04.0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	5.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13.791.061.536,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	3.930.954.900,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	724.999.992,00
5.1.02.02.05.0005	Belanja Sewa Bangunan Gedung Laboratorium	145.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	75.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.574.350.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	123.100.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	682.140.000,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	246.666.672,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	1.665.209.980,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	2.393.640.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	199.999.992,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.100.000,00
5.1.02.02.06.0118	Belanja Sewa Instalasi Lain	9.100.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	6.000.000,00
5.1.02.02.08	<i>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</i>	<i>34.398.977.750,00</i>
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	8.750.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	18.240.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	73.400.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	10.740.140.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	12.325.000.000,00
5.1.02.02.08.0016	<i>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape</i>	<i>35.540.000,00</i>
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	2.538.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	37.250.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.750.517.750,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	55.000.000,00
5.1.02.02.08.0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	108.100.000,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	42.000.000,00
5.1.02.02.08.0024	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	509.400.000,00
5.1.02.02.08.0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	480.000.000,00
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	600.000.000,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	32.500.000,00
5.1.02.02.08.0030	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0032	<i>Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan</i>	<i>3.445.140.000,00</i>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	500.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	21.201.875.000,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	1.100.000.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.444.500.000,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000,00
5.1.02.02.09.0005	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	735.000.000,00
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	600.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	20.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	12.612.375.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	90.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	2.600.000.000,00
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	900.000.000,00
5.1.02.02.09.0016	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata	1.000.000.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	30.525.000,00
5.1.02.02.10.0006	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	30.525.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	111.000.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	111.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	17.525.987.600,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	8.226.100.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	4.528.040.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	3.601.550.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.170.297.600,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	31.190.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	31.190.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	35.426.829.728,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	15.750.000,00
5.1.02.03.01.0011	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan	15.750.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.216.266.700,00
5.1.02.03.02.0014	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0019	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	49.728.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	300.334.800,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	41.100.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.268.693.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	65.490.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	808.278.300,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	178.416.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	654.514.800,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.250.759.200,00
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	1.683.600.000,00
5.1.02.03.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	3.500.000,00
5.1.02.03.02.0082	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	55.500.000,00
5.1.02.03.02.0090	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	70.000.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	94.400.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	559.626.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	16.150.500,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.005.970.300,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	72.646.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	500.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	58.220.000,00
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	3.420.000.000,00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	25.000.000,00
5.1.02.03.02.0345	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	300.000.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	533.709.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	71.500.000,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	240.000.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	236.381.900,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	63.026.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	469.222.900,00
5.1.02.03.02.0491	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.005.506.028,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	7.005.110.368,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	830.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.03.0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	200.000.000,00
5.1.02.03.03.0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	150.000.000,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	40.500.000,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	33.203.440,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	531.692.220,00
5.1.02.03.03.0064	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.777.422.000,00
5.1.02.03.04.0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.340.000.000,00
5.1.02.03.04.0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.03.04.0100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.000.000.000,00
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	22.422.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	62.885.000,00
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	30.000.000,00
5.1.02.03.05.0055	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-Algae Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)	7.385.000,00
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	25.500.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	349.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	349.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	269.562.519.784,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	263.062.519.784,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	228.823.484.884,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	570.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.575.730.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.425.695.500,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	13.667.609.400,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	6.500.000.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	6.500.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.322.990.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.722.990.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.375.140.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	145.600.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	15.199.250.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Masyarakat	3.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.600.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8.600.000.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	65.778.760.000,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	65.778.760.000,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	65.778.760.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	132.800.000.000,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	132.800.000.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	132.800.000.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	19.152.791.500,00
5.1.04.03	<i>Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta</i>	19.152.791.500,00
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	19.152.791.500,00
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	19.152.791.500,00
5.1.05	Belanja Hibah	191.370.124.680,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.734.408.000,00
5.1.05.02.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.734.408.000,00
5.1.05.02.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.734.408.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	180.103.096.680,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	157.845.891.680,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	156.065.891.680,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.780.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	21.525.350.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	21.185.350.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	340.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	22.255.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	22.255.000,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	154.600.000,00
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	154.600.000,00
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	150.000.000,00
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	150.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	405.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	405.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	7.032.620.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	5.000.350.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	5.000.350.000,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	1.781.470.000,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	1.781.470.000,00
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	250.800.000,00
5.1.05.06.04.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	250.800.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.500.000.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.500.000.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.500.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.989.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	664.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	240.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	240.000.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	424.000.000,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	424.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	3.325.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	625.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	625.000.000,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.700.000.000,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.700.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>578.239.586.981,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.741.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	10.741.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	10.741.000.000,00
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	10.100.000.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	641.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.342.329.089,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	228.050.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	228.050.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	202.500.000,00
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	20.000.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	5.550.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	26.391.033.965,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	21.628.696.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.562.500.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	6.814.850.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.136.066.500,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	785.280.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	5.330.000.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	4.762.337.465,00
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	200.000.000,00
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	4.562.337.465,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	409.350.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	18.750.000,00
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	18.750.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	390.600.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	36.750.000,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	11.100.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	342.750.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	35.950.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	35.950.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	35.950.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.795.554.765,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	5.156.162.505,00
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	25.440.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	425.028.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.705.694.505,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.147.592.260,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	9.842.890.260,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	15.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	284.922.500,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	54.350.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.079.767.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	870.662.500,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	491.800.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	25.000.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	199.400.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	102.200.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	147.700.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	17.500.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.883.164.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.550.644.500,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	179.005.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	734.614.500,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	113.260.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	110.750.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	413.015.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	182.010.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	10.000.000,00
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	15.800.000,00
5.2.02.06.02.0010	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	32.810.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	123.400.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	134.800.000,00
5.2.02.06.03.0004	Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF	4.800.000,00
5.2.02.06.03.0033	Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	130.000.000,00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	15.710.000,00
5.2.02.06.04.0007	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	15.710.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	32.553.815.541,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	32.553.815.541,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	32.553.815.541,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	10.458.581.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.009.520.000,00
5.2.02.08.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Batuan/Geologi	1.750.000,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	7.770.000,00
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	1.000.000.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	6.760.186.000,00
5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	5.660.186.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.100.000.000,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	38.875.000,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	38.875.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.585.000.000,00
5.2.02.08.07.0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan	1.585.000.000,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	1.065.000.000,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	1.065.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.350.129.318,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	5.388.691.181,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4.792.259.181,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	596.432.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.961.438.137,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	267.725.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	60.000.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.633.713.137,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	49.950.000,00
5.2.02.11.01	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	49.950.000,00
5.2.02.11.01.0003	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	49.950.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.386.750.000,00
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	15.000.000,00
5.2.02.15.01.0003	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	15.000.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	1.362.750.000,00
5.2.02.15.02.0004	Belanja Modal Sabuk Pengaman	3.000.000,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	1.359.750.000,00
5.2.02.15.04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	9.000.000,00
5.2.02.15.04.0006	Belanja Modal Alat Ukur Peralatan Faselctrik	9.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	800.000.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	800.000.000,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	800.000.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	203.128.626.892,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	200.936.646.892,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	175.491.926.892,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	85.230.560.392,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	125.000.000,00
5.2.03.01.01.0003	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	180.000.000,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	11.621.257.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.300.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	44.175.821.500,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.880.000.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	100.000.000,00
5.2.03.01.01.0017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	7.050.000.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	10.988.288.000,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	490.000.000,00
5.2.03.01.01.0028	Belanja Modal Bangunan Industri	250.000.000,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	4.051.000.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.420.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	180.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	400.000.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	25.444.720.000,00
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	10.110.000.000,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	15.334.720.000,00
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	891.980.000,00
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	891.980.000,00
5.2.03.03.01.0005	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	891.980.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.300.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.300.000.000,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	304.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	900.000.000,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	96.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	257.480.576.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	232.552.591.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	207.872.591.000,00
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	191.772.591.000,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	16.100.000.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	24.680.000.000,00
5.2.04.01.02.0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	24.600.000.000,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	80.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	13.653.000.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	13.653.000.000,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10.229.000.000,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	3.424.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	11.240.000.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	9.720.000.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	9.720.000.000,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	1.400.000.000,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.400.000.000,00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	120.000.000,00
5.2.04.03.09.0001	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	120.000.000,00
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	34.985.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	34.985.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	34.985.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	63.500.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	40.000.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	40.000.000,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	40.000.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	23.500.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	23.500.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	23.500.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	7.483.555.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	483.555.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	483.555.000,00
5.2.06.01.01.0002	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	24.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	459.555.000,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	7.000.000.000,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	7.000.000.000,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	7.000.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>15.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>654.627.028.710,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	411.168.078.710,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	411.168.078.710,00
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	308.787.471.320,00
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	308.787.471.320,00
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	102.380.607.390,00
5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	102.380.607.390,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	243.458.950.000,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	243.458.950.000,00
5.4.02.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	145.500.000.000,00
5.4.02.03.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	145.500.000.000,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	97.958.950.000,00
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	97.958.950.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.502.591.835.909,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-395.593.756.639,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>415.593.756.639,00</b>

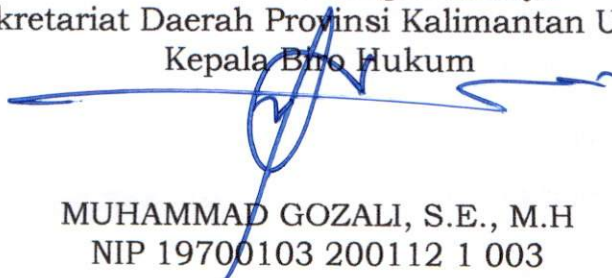
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	415.593.756.639,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	415.593.756.639,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	415.593.756.639,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	415.593.756.639,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>20.000.000.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	20.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.000.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>20.000.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>395.593.756.639,00</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
 Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H  
 NIP 19700103 200112 1 003